



Bisa Tekan Perkelahian

Antarpelajar

■ Sistem Zonasi Berbasis RW

Berlaku Mulai Tahun Ajaran 2018-2019

YOGYA, TRIBUN - Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta mulai menerapkan sistem zonasi berbasis RW untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2018-2019.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Edy Heri Suasana menjelaskan bahwa pihaknya melakukan pengukuran jarak melalui udara berbasis Rukun Warga (RW).

Nantinya, zonasi yang akan diberlakukan adalah menarik garis lurus dari titik tengah RW siswa ke sekolah yang bersangkutan.

"Pertimbangannya (PPDB, **Red**) memang zonasi, tapi nilai ujian sekolah juga jadi pertimbangan untuk masuk sekolah negeri," katanya, Senin (26/2).

● ke halaman 19

Bisa Tekan

• Sambungan Hal 13

Edy menerangkan bahwa nilai ujian sekolah tetap dipandang penting. Hal tersebut karena ketika beberapa siswa ingin masuk ke satu sekolah yang sama dengan jarak rumah yang sama, maka yang digunakan sebagai pertimbangan adalah nilai ujian sekolah.

"Kalau jaraknya sama, yang bersaing adalah nilainya. Ini saya sampaikan ke masyarakat, agar orang patokannya tidak hanya modal zonasi saja," ungkapnya.

Terkait sebaran sekolah yang tidak merata, yakni SMP Negeri yang lebih banyak di sisi utara, menurutnya bukanlah jadi masalah. Pasalnya setiap anak diberikan keleluasaan untuk memilih SMP Negeri sesuai dengan prioritas pilihannya maksimal di 16 sekolah.

"Misalkan di Kecamatan Pakualaman, Mergansan, dan Ngampilan tidak ada SMP Negeri, padahal lulusan SD banyak. Itu mereka silakan memilih sekolah, karena zonasi bukan satu-satunya (peneru), ada nilai ujian sekolah," ujarnya.

Ia mengatakan bahwa kuota

untuk siswa dalam daerah sebesar 90 persen, termasuk siswa KMS juga ikut dalam kuota tersebut. Sementara 5 persen jalur khusus, misalkan orangtuanya merupakan pejabat yang harus dinas di daerah yang berbeda dan 5 persen lain siswa dari luar daerah.

"Sistem zonasi ini harapannya agar tidak ada lagi sekolah favorit tertentu, melainkan semua sekolah menjadi sekolah favorit," tuturnya.

Rotasi guru

Edy menambahkan, pihaknya sudah melakukan rotasi atau perpindahan guru SMP Negeri. Selain itu upaya lain yang dilakukan adalah dengan menyeragamkan sarana prasarana yang ada di sekolah.

"Mulai dari LCD, Komputer, CCTV, hingga mobil operasional untuk mengirim murid ikut lomba, semua sekolah sudah punya," katanya.

Jumlah SMP Negeri di Kota Yogyakarta adalah 16 sekolah, sementara jumlah SD Negeri yang ada 89 sekolah dengan potensi lulusan SD sekitar 7.000 siswa.

Kurang Kemacetan

Anggota Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Dwi Budi Utomo mengatakan bahwa sistem zonasi justru memberi-

kan beberapa dampak positif. Salah satunya yang akan terlihat secara nyata adalah kondisi lalu lintas di jalanan Kota Yogyakarta.

"Side effect dari sistem zonasi ini adalah berkurangnya kepadatan lalu lintas di jalanan, karena siswa sekolah di sekolah-sekolah yang dekat dengan rumahnya," ujarnya, Senin (26/2).

Amanat Permendikbud yang harus dijalankan tersebut, lanjutnya, menjadikan zonasi sebagai salah satu pertimbangan membuat nilai bukan menjadi satu-satunya penentu.

Hal itu tentu membuat pihak sekolah, khususnya pendidik untuk bisa menggali segenap potensi akademik siswa yang beragam, sehingga mendapatkan output yang baik.

"Ini akan membuktikan apakah satu sekolah itu betul-betul berkualitas," tandasnya.

Politisi PKS tersebut menilai, berhubung setiap sekolah akan menerima siswa dengan kondisi akademik yang beragam, maka besar kemungkinan akan terjadi persaingan yang lebih ketat dalam makna positif. Antarsekolah akan berlomba menunjukkan prestasi belajar dan pendidikan di masing-masing sekolah.

"Sebutan sekolah favorit dengan sendirinya akan beralih. Dari sebelumnya sekolah yang memang sejak awal dimasuki siswa-siswa berprestasi, menuju kepada sekolah-sekolah yang memang seperti apapun kondisi akademik siswa ketika masuk, namun tetap mampu menghasilkan output yang berkualitas karena proses pendidikan di sekolah memang baik," bebernya.

Kurangi perkelahian

Mengingat banyaknya kekerasan yang dilakukan pelajar usia SMP, dengan adanya zonasi ini, Dwi Budi percaya akan memunculkan dampak nyata berupa berkurangnya perkelahian antarpelajar.

"Karena semakin sedikitnya singgungan di luar sekolah," ungkapnya.

Walau demikian, Dwi Budi menekankan agar orangtua dituntut juga untuk tidak lepas tangan dengan menyerahkan nasib pendidikan anaknya hanya kepada sekolah.

"Di rumah, para orang tua harus ikut bertanggung jawab untuk memotivasi, mendampingi, serta memfasilitasi belajar anak-anaknya. Apalagi sekarang sedang digalakkan JBM (Jam Belajar Masyarakat)," pungkas Dwi Budi. (kur)

Amanat Pemerintah

WALI Kota Yogyakarta, Harjadi Suyuti mengingatkan masyarakat, khususnya orangtua dan siswa yang hendak memilih sekolah, agar tidak menjadikan sistem zonasi sebagai sesuatu yang memberatkan.

"Nilai ujian tetap dipakai. Jadi tidak usah cemas dengan adanya zonasi," tegasnya.

PPDB berdasarkan sistem zonasi tersebut ber-

dasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 17 tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat.

● ke halaman 19

Amanat Pemerintah

● Sambungan Hal 13

Pada pasal 15 ayat (1) disebutkan bahwa sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90 per-

sen dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

Selanjutnya, pada ayat (5) disebutkan sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat menerima calon peserta didik melalui jalur prestasi yang berdomisili di luar radius zona terdekat dari sekolah paling banyak 5 persen dari total jumlah ke-

seluruhan peserta didik yang diterima.

Jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zona terdekat dari sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orangtua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial, paling banyak 5 persen dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. (kur)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005